

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai evaluasi program pengembangan wisata Kampung Pelangi di Kota Semarang belum optimal karena masih terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaannya. Penilaian didasarkan pada empat aspek model evaluasi program menurut D. L. Stufflebeam (2013), yang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

a. *Context*

Program pengembangan wisata Kampung Pelangi memiliki tujuan yang komprehensif, tidak hanya berorientasi pada peningkatan daya tarik wisata, tetapi juga mencakup perbaikan lingkungan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan aspek legalitas aset tanah. Dari sisi konteks, program ini sudah tergolong optimal, karena mampu menjawab permasalahan awal kawasan kumuh menjadi kawasan wisata berbasis masyarakat.

b. *Input*

Pada aspek *input*, ditemukan bahwa sumber daya yang tersedia masih belum sepenuhnya memadai, terutama terkait keterbatasan anggaran, lemahnya kapasitas sumber daya manusia, serta belum optimalnya pendampingan berkelanjutan. Meskipun terdapat dukungan fasilitas dan pelatihan, pemanfaatannya belum maksimal. Oleh karena itu, aspek input dinilai belum optimal.

c. *Process*

Pelaksanaan program secara umum telah berjalan dengan baik, ditandai dengan adanya partisipasi masyarakat, dukungan pemerintah, serta struktur organisasi yang jelas melalui pokdarwis. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kendala seperti partisipasi yang bersifat kondisional, lemahnya koordinasi internal, dan belum optimalnya komunikasi. Dengan demikian, aspek proses dapat dikategorikan cukup optimal, tetapi masih perlu perbaikan.

d. *Product*

Hasil program menunjukkan adanya perubahan signifikan, baik dari segi fisik lingkungan yang lebih tertata dan menarik, peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, hingga meningkatnya citra kawasan sebagai destinasi wisata. Namun, keberlanjutan hasil tersebut masih menghadapi tantangan, terutama terkait pemeliharaan fasilitas dan konsistensi partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, aspek produk dinilai cukup optimal, namun belum berkelanjutan secara maksimal.

Faktor-faktor yang berkontribusi pada pengembangan wisata Kampung Pelangi di Kota Semarang berdasarkan hasil temuan di lapangan yaitu sebagai berikut:

- a. Faktor pendorong pengembangan wisata Kampung Pelangi di Kota Semarang sebagai unsur penting dalam ketercapaian aspek *process* yaitu faktor partisipasi masyarakat, yang tergolong cukup baik karena masyarakat telah terlibat aktif dan memiliki semangat gotong royong. Namun, partisipasi tersebut belum sepenuhnya konsisten dan masih dipengaruhi oleh insentif tertentu. Dengan demikian, aspek ini cukup optimal tetapi belum berkelanjutan. Selanjutnya, faktor dukungan pemerintah merupakan faktor pendorong dalam pengembangan wisata Kampung Pelangi, terlihat dari adanya kebijakan, penyediaan fasilitas, promosi wisata, serta kolaborasi lintas sektor melalui berbagai OPD dan skema CSR. Secara keseluruhan, aspek ini relatif optimal. Kemudian, faktor struktur organisasi berperan penting dalam pencapaian aspek *input*. Struktur organisasi melalui pokdarwis telah terbentuk secara formal dan memiliki dasar hukum yang jelas. Struktur ini menjadi faktor pendukung karena memberikan kejelasan peran dan tanggung jawab, serta mempermudah koordinasi. Selain itu, birokrasi yang sederhana turut mendukung kelancaran program. Namun demikian, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal implementasi tugas, kerja sama internal, serta keberlanjutan organisasi. Dengan demikian, aspek ini cukup optimal.

- b. Faktor penghambat pengembangan wisata Kampung Pelangi di Kota Semarang sebagai unsur penting dalam ketercapaian aspek *input* yaitu faktor sumber daya menjadi faktor yang belum optimal, ditandai dengan keterbatasan anggaran, rendahnya keaktifan SDM, serta lemahnya kelembagaan pokdarwis. Meskipun terdapat peluang ekonomi, pelatihan, dan akses informasi, pemanfaatannya belum maksimal. Selanjutnya, sebagai unsur penting dalam ketercapaian aspek *process* yaitu faktor komunikasi, antara pemerintah dan masyarakat telah terjalin dengan cukup baik, termasuk melalui media digital seperti Whatsapp. Namun, komunikasi belum berjalan secara optimal dalam hal koordinasi rutin, penyampaian informasi, serta pendampingan yang berkelanjutan, sehingga mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program.

4.2 Saran

Sebagai tindak lanjut dari kesimpulan penelitian mengenai Evaluasi Program Pengembangan Wisata Kampung Pelangi, peneliti merumuskan beberapa saran strategis yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait guna menjamin keberlanjutan destinasi, yakni sebagai berikut:

Saran Praktis

- 1) Pemerintah Kota Semarang perlu memperkuat komitmen keberlanjutan program melalui pendampingan yang lebih konsisten, tidak hanya pada aspek fisik (pengecatan dan infrastruktur), tetapi juga pada pengembangan kapasitas sumber daya manusia, inovasi produk wisata, serta strategi pemasaran digital. Selain itu, perlu dilakukan integrasi Kampung Pelangi ke dalam sistem promosi pariwisata kota secara lebih aktif agar arus kunjungan wisatawan dapat kembali meningkat dan stabil.
- 2) Pokdarwis sebagai pengelola destinasi perlu memperkuat tata kelola kelembagaan, termasuk pembagian tugas yang lebih jelas, regenerasi kepengurusan, serta peningkatan kapasitas dalam bidang *hospitality*, manajemen destinasi, dan pengelolaan media sosial. Pengembangan paket wisata berbasis pengalaman (*experience-based tourism*) perlu diperluas agar tidak hanya bergantung pada daya tarik visual kawasan. Dapat

mengoptimalkan peran pokdarwis dalam mengelola dan memasarkan produk lokal serta menyarankan model pengelolaan berkelanjutan untuk fasilitas yang ada.

- 3) Masyarakat diharapkan terus meningkatkan kreativitas dan inovasi produk unggulan lokal, serta membangun kolaborasi antar pelaku usaha agar tercipta ekosistem ekonomi yang saling mendukung. Selain itu, kesadaran kolektif dalam menjaga kebersihan dan estetika kawasan perlu dipertahankan sebagai identitas utama Kampung Pelangi.

Saran Kebijakan

- 1) Pemerintah Kota Semarang perlu menerbitkan regulasi teknis atau *Standard Operating Procedure* (SOP) yang mengatur jadwal pemeliharaan rutin infrastruktur wisata. Hal ini penting agar aspek perawatan (seperti pengecatan ulang dan perbaikan fasilitas) memiliki payung hukum dan alokasi anggaran yang pasti.
- 2) Diperlukan kebijakan yang mengatur skema pendanaan berkelanjutan, seperti pembentukan dana khusus destinasi wisata berbasis masyarakat atau penguatan kemitraan dengan sektor swasta melalui skema CSR yang lebih terstruktur dan berjangka panjang.
- 3) Perlu adanya kebijakan yang mewajibkan standar aksesibilitas dan keselamatan pada setiap destinasi wisata berbasis kampung tematik, guna memastikan prinsip pariwisata berkelanjutan yang aman bagi semua kalangan sehingga terwujud secara formal.

Saran Akademik

- 1) Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji efektivitas program Kampung Pelangi dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, khususnya dalam mengukur dampak ekonomi secara lebih komprehensif terhadap pendapatan rumah tangga dan kontribusinya terhadap perekonomian lokal.
- 2) Penelitian lanjutan juga dapat mengembangkan kajian komparatif antara Kampung Pelangi dengan destinasi serupa di kota lain (seperti Kampung

Warna-Warni Jodipan di Malang) untuk mengidentifikasi model pengelolaan yang paling efektif dan berkelanjutan.

- 3) Selain itu, kajian mengenai strategi branding destinasi, digital marketing, serta model pemberdayaan berbasis komunitas dalam konteks wisata perkotaan juga menjadi ruang penelitian yang relevan untuk memperkaya literatur pengembangan pariwisata berbasis masyarakat.